

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Per Posisi Tanggal : 15 Januari 2018/Khusus - Calon PN)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)
UNIT KERJA : PEMERINTAH KOTA PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EMZALMI
2. Jabatan : CALON WALIKOTA
3. NHK : 34848

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.983.484.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/- m2 di Kota PADANG, HASIL SENDIRI Rp. 48.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 636 m2/- m2 di Kota PADANG, HASIL SENDIRI Rp. 636.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 2530 m2/- m2 di Kota PADANG, HASIL SENDIRI Rp. 126.500.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1023 m2/- m2 di Kota PADANG, HASIL SENDIRI Rp. 102.300.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 238 m2/- m2 di Kota PADANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
6. Tanah dan Bangunan Seluas 233 m2/- m2 di Kota PADANG, HASIL SENDIRI Rp. 23.300.000		
7. Tanah dan Bangunan Seluas 460 m2/210 m2 di Kota PADANG, HASIL SENDIRI Rp. 417.554.000		
8. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/48 m2 di Kota PADANG, HASIL SENDIRI Rp. 56.784.000		
9. Tanah dan Bangunan Seluas 282 m2/135 m2 di Kota PADANG, HASIL SENDIRI Rp. 218.046.000		
10. Tanah dan Bangunan Seluas 167 m2/100 m2 di Kota PADANG, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000		
11. Tanah dan Bangunan Seluas 424 m2/120 m2 di Kota PADANG, WARISAN Rp. 210.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	120.000.000
1. MOBIL, MITSUBISHI LANCER LANCER Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
2. MOBIL, BRIO BRIO SATYA DDI. 1.2 F MT CKD Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	36.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	369.088.767
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
III. HUTANG	Rp.	----

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
5. Pengumuman ini disahkan di Jakarta tanggal 7 Maret 2018.